



PARLEMENTARIA

Pangkas Anggaran

ANGGARAN perjalanan dinas luar negeri untuk 65 anggota DPRD Kalbar pada APBD 2018 dipangkas. "Itu dana untuk studi banding, promosi dan lainnya. Tetapi, defisit anggaran disepakati dana tersebut ditiadakan," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah, belum lama ini.

Menurutnya, pembatalan item perjalanan dinas ke luar negeri akan menyebabkan APBD perubahan tahun anggaran 2018.

"Kami sudah dengar adanya selentingan masyarakat. Mereka bertanya-tanya, kenapa anggaran defisit masih saja mau melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Seolah-olah mau jalan-jalan saja," ucap Suriansyah.

Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 terdapat sejumlah target pendapatan dan belanja daerah tidak terealisasi atau kurang penganggarnya.



◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Pangkas Anggaran

Sambungan dari halaman 9

Secara keseluruhan Silpa tahun anggaran 2017 tak tercapai, kurang salur bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, belum dialokasikannya belanja langsung DBH tahun anggaran 2017 dan 2018.

Ketua Gerindra Kalbar ini menambahkan bahwa informasi masyarakat yang diterima, kenapa defisit anggaran masih saja melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. "Kenapa pada saat defisit anggota dewan masih mau berjalan kelu-

ar negeri di olah-olah mau jalan-jalan saja. Kami juga tak mau mendengar anggapan miring tersebut," tukasnya.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Kalbar bersepakat membatalkan rencana perjalanan dinas keluar negeri. "Untuk itu, kami menyikapi dengan membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyak mengurangi defisit anggaran yang terjadi di pemerintah provinsi. Ini merupakan salah satu yang paling penting," tu-

tup Suriansyah.

Lutfi Abdul Hadi, anggota Banggar DPRD Kalbar menyebutkan memang melihat situasi defisit, pemangkasan anggaran perjalanan dinas wakil rakyat ke luar negeri merupakan pilihan terbaik. "Saya pikir sudah tepatlah. Kami juga bahas bersama-sama Banggar nantinya," ucapnya.

Disinggung berapa besar anggaran ke luar negeri? Lutfi menyampaikan bahwa nilainya diperkirakan satu anggota DPRD Kalbar sebesar Rp50 juta per satu dewan. Akumu-

lasikan saja dengan jumlah 65 anggota DPRD Kalbar. "Kecil jumlahnya tidak sampai puluhan miliar. Kami membatalkan karena juga prihatin dengan masyarakat," tukasnya.

Pengamat Sosial Politik Universitas Tanjungpura, Ireng Maulana menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas keluar negeri ditengah defisit anggaran APBD Kalbar tahun anggaran 2018, pilihan terbaik diantara terbaik. "Ini demi efisiensi. Kalau perlu anggaran lain juga dikenakan efisiensi," tutur dia. (den)